

Dari Kontroversi ke Legitimasi: Negosiasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto

From Controversy to Legitimacy: Negotiations on the Free Nutritious Meals Programme on Social Media During the Prabowo Subianto Administration

Enny Fathurachmi¹, Chairul Aftah²

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia¹

Universitas Mulawarman, Samarinda Indonesia²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai legitimasi kebijakan yang dinegosiasikan melalui interaksi antara negara dan publik di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dan analisis wacana digital, studi ini mengkaji dinamika komunikasi kebijakan pada kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak terbentuk secara linear melalui komunikasi pemerintah, melainkan melalui proses negosiasi diskursif yang melibatkan klaim otoritas negara, tantangan publik, serta respons adaptif pemerintah. Media sosial berfungsi sebagai arena kontestasi di mana makna kebijakan dipertukarkan, dinegosiasikan, dan diproduksi ulang secara berkelanjutan. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa penerimaan publik bersifat kondisional, bergantung pada responsivitas pemerintah dalam merespons kritik dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi kebijakan dalam konteks digital bersifat relasional dan iteratif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori legitimasi dengan menempatkannya sebagai hasil interaksi komunikatif, serta memperluas pemahaman mengenai peran media sosial dalam proses governance kontemporer.

Kata kunci: legitimasi kebijakan¹, media sosial², negosiasi³, komunikasi publik⁴, governance⁵

Abstract

This study aims to analyse how policy legitimacy is negotiated through interactions between the state and the public on social media. Using an interpretative qualitative approach and digital discourse analysis, this study examines the dynamics of policy communication in the case of the Free Nutritious Meals Programme (MBG) during Prabowo Subianto's administration. The findings indicate that policy legitimacy is not formed linearly through government communication, but rather through a process of discursive negotiation involving claims of state authority, public challenges, and adaptive government responses. Social media functions as an arena of contestation where the meaning of policy is exchanged, negotiated, and continuously reproduced. These findings also indicate that public acceptance is conditional, depending on the government's responsiveness to public criticism and demands. Thus, policy legitimacy in the digital context is relational and

iterative. This study contributes to the development of legitimacy theory by positioning it as the result of communicative interaction, and expands understanding of the role of social media in contemporary governance processes.

Keywords: *policy legitimacy¹, social media², negotiation³, public communication⁴, governance⁵*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola publik telah mengubah secara mendasar hubungan antara negara dan warga. Kebijakan tidak lagi hadir sebagai keputusan yang selesai ketika diumumkan melalui kanal resmi, melainkan memasuki fase baru ketika dipertemukan dengan ruang percakapan publik di media sosial. Pada ruang ini, masyarakat tidak hanya menerima atau menolak, tetapi menafsirkan, membantah, memodifikasi, bahkan memaksa negara menyesuaikan narasi maupun substansi kebijakan secara real-time. Media sosial memungkinkan interaksi horizontal yang menghapus batas komunikasi top-down tradisional, sehingga kebijakan beroperasi dalam kondisi pengawasan publik yang terus berlangsung (Walsh et al., 2021; Sandhu et al., 2023). Dalam situasi tersebut, klaim otoritas negara berhadapan dengan klaim moral masyarakat yang diproduksi oleh beragam aktor—warga, influencer, komunitas, maupun jaringan pengetahuan—yang semuanya memiliki kapasitas untuk memobilisasi dukungan atau resistensi (Joanly et al., 2022; Chan et al., 2023).

Akibatnya, keberhasilan implementasi kebijakan semakin ditentukan oleh kemampuan negara mempertahankan pengakuan publik, bukan sekadar legalitas formal. Bahkan dalam konteks krisis, persepsi risiko dan interaksi digital terbukti secara langsung memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah dan kepatuhan kebijakan (Salah et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan perubahan penting yaitu legitimasi kebijakan tidak lagi stabil, tetapi menjadi sesuatu yang harus terus diproduksi melalui interaksi komunikasi sehari-hari.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam beberapa kasus di Indonesia. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), misalnya, tidak hanya terjadi dalam demonstrasi fisik, tetapi berkembang menjadi perdebatan digital panjang di Twitter dan Instagram yang memaksa pemerintah melakukan klarifikasi berulang, menerbitkan infografik penjelasan, hingga membuka kanal komunikasi khusus untuk merespons isu hoaks dan kritik publik. Situasi tersebut bahkan terdokumentasi luas dalam pemberitaan nasional yang menunjukkan bagaimana pemerintah secara aktif melakukan kontra-narasi terhadap kritik publik di ruang digital (BBC News Indonesia, 2020; Kompas.com, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berlangsung sebagai proses interaktif antara negara dan public (Muhammad, 2025). Demikian pula pada kebijakan penyesuaian harga BBM tahun 2022, pemerintah secara aktif memantau percakapan media

sosial dan merespons kritik masyarakat melalui konferensi pers daring, konten visual edukatif, serta dialog langsung pejabat dengan warganet, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung bersamaan dengan negosiasi makna di ruang digital. Respons ini tercermin dalam berbagai laporan media yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengelola persepsi publik dan meredam resistensi melalui komunikasi digital yang intensif (Tempo.co, 2022; CNN Indonesia, 2022). Hal ini juga mengindikasikan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang interaksi yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan (Sandhu et al., 2023; Wash et al., 2021). Bahkan dalam konteks kesehatan publik saat pandemi COVID-19, perubahan aturan PPKM kerap mengikuti dinamika respons masyarakat yang disuarakan melalui media sosial, dimana klarifikasi, revisi aturan teknis, dan penyesuaian komunikasi risiko dilakukan setelah terjadi perdebatan publik yang dilakukan secara daring. Laporan dari Kompas.com (2021) dan Detik.com (2021) menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif menyesuaikan komunikasi risiko dan memberikan penjelasan tambahan untuk merespons kebingungan dan kritik masyarakat. Pemerintah tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga menyesuaikan komunikasi risiko dan melakukan klarifikasi berdasarkan dinamika diskursus public yang berkembang di media sosial (Schwaderee, 2025; Salah et al., 2021). Dengan demikian, dari berbagai kasus tersebut menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik di era digital berlangsung bersamaan dengan proses negosiasi makna antara pemerintah dan masyarakat dalam ruang komunikasi daring. Hasil negosiasi di ruang publik melalui media sosial pada akhirnya berkaitan dengan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Literatur menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi oleh persepsi legitimasi yang terbentuk melalui responsivitas pemerintah terhadap tuntutan publik (Grelle & Hofmann, 2023; Wiranti & Ariawantara, 2024). Partisipasi warga dalam proses kebijakan meningkatkan penerimaan karena mereka melihat kebijakan sebagai hasil interaksi, bukan paksaan (Riduan, 2024). Dengan kata lain, kepatuhan bersifat kondisional: masyarakat patuh ketika mereka merasa diakui dalam proses komunikasi (Lyu, 2025). Dalam kerangka governance jaringan, legitimasi bahkan lebih bergantung pada kualitas hubungan antaraktor daripada pada kewenangan formal (Järvelä, 2024; Akker et al., 2024). Negara tidak lagi hanya memerintah, tetapi harus terus merundingkan otoritasnya dalam jaringan komunikasi. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menempatkan media sosial sebagai arena negosiasi legitimasi kebijakan, di mana interaksi diskursif antara negara dan publik menentukan apakah suatu kebijakan memperoleh pengakuan atau justru mengalami delegitimasi.

Secara teoritis, perubahan tersebut belum sepenuhnya diakomodasi oleh literatur. Tradisi klasik memahami legitimasi sebagai atribut normatif yang berasal dari kepatuhan terhadap hukum dan prosedur formal (Rendtorff, 2020). Namun pendekatan ini semakin tidak memadai karena legitimasi kini muncul melalui pengakuan sosial yang dibentuk dalam praktik komunikasi politik sehari-hari (Schmitt-Beck, 2022; Brenton & Stein, 2024). Studi komunikasi digital memang menunjukkan bahwa pemimpin membangun citra dan kepercayaan melalui interaksi berkelanjutan di media sosial (Putri, 2025; Couraceiro et al., 2025), tetapi sebagian besar penelitian masih menempatkan komunikasi sebagai sarana persuasi. Di sisi lain, penelitian framing kebijakan memperlihatkan bahwa makna kebijakan selalu diperebutkan melalui interpretasi aktor yang berbeda (Dodge & Metze, 2024; Pettersson et al., 2023), bahkan dapat menghasilkan legitimasi atau delegitimasi yang kontekstual (Diamond, 2023). Namun literatur tersebut tetap memisahkan proses komunikasi dari relasi kekuasaan yang dinegosiasikan. Padahal penelitian terbaru menegaskan bahwa interaksi pemerintah dengan publik merupakan arena negosiasi makna dan otoritas, bukan sekadar penyampaian informasi (Muhammad, 2025; Schwaderer, 2025). Kekosongan muncul karena studi legitimasi, komunikasi kebijakan, dan partisipasi publik berkembang secara paralel tanpa kerangka terpadu yang menjelaskan bagaimana legitimasi terbentuk melalui interaksi diskursif digital. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada upaya memandang legitimasi sebagai hasil negosiasi relasional antara negara dan publik dalam ruang komunikasi jaringan, bukan sebagai efek komunikasi ataupun atribut institusional.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana legitimasi kebijakan diproduksi melalui interaksi komunikatif antara negara dan publik dalam media sosial. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana negara dan publik menegosiasikan legitimasi kebijakan melalui interaksi di media sosial? Fokus penelitian bukan pada efektivitas komunikasi pemerintah, melainkan pada proses interaksi yang mengubah posisi otoritas kebijakan. Hal ini penting karena penerimaan kebijakan modern terbukti tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepercayaan, tetapi oleh responsivitas pemerintah terhadap tuntutan publik dan keterlibatan warga dalam proses kebijakan (Grelle & Hofmann, 2023; Wiranti & Ariawantara, 2024). Kepatuhan masyarakat sering bersifat kondisional dan bergantung pada persepsi legitimasi yang terus diperbarui (Lyu, 2025). Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan juga berkorelasi positif dengan legitimasi kebijakan (Riduan, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memposisikan interaksi digital sebagai proses tawar-menawar yang menentukan apakah kebijakan dipatuhi, ditunda, atau dipaksa direvisi. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk klaim

otoritas negara, bentuk resistensi publik, serta bagaimana keduanya bertransformasi menjadi pengakuan atau penolakan kebijakan.

Penelitian ini mengambil satu kasus untuk memperkuat konsepsi tentang kebijakan publik yang melahirkan legitimasi namun melalui proses interaksi dan negosiasi diruang public berkenaan dengan kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo Subiyanto. Program Makan Bergizi Gratis dipilih sebagai kasus penelitian karena merepresentasikan kebijakan dengan tingkat kontroversi tinggi yang memicu interaksi intens antara negara dan publik di media sosial. Sebagai kebijakan populis dengan implikasi fiskal besar, MBG tidak hanya menghadapi klaim legitimasi dari pemerintah, tetapi juga resistensi publik yang signifikan, sehingga menciptakan kondisi ideal untuk mengamati proses negosiasi legitimasi. Selain itu, dinamika komunikasi kebijakan dalam kasus ini menunjukkan pergeseran dari model komunikasi satu arah menuju interaksi diskursif yang bersifat iteratif. Dengan demikian, MBG menyediakan konteks empiris yang kuat untuk memahami bagaimana legitimasi kebijakan tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dinegosiasikan melalui interaksi antara negara dan publik dalam ruang digital.

Argumen utama yang ingin dibangun dari penelitian ini adalah bahwa dalam masyarakat jaringan, otoritas negara tidak lagi terutama bersumber dari hierarki institusional, melainkan dari legitimasi yang dipertahankan melalui interaksi berulang dalam jaringan komunikasi. Model governance modern menekankan bahwa legitimasi muncul dari proses keterlibatan dan hubungan antaraktor, bukan semata dari keputusan formal (Järvelä, 2024; Akker et al., 2024). Kontestasi antar visi kebijakan menunjukkan bahwa otoritas merupakan hasil kompetisi klaim legitimasi di antara berbagai aktor (Canfield et al., 2021). Oleh karena itu, komunikasi kebijakan di media sosial harus dipahami sebagai proses negosiasi yang menghasilkan kepatuhan kondisional, bukan penerimaan permanen. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan mengintegrasikan teori legitimasi, komunikasi kebijakan, dan negosiasi dalam satu kerangka analitis, serta secara praktis menawarkan pemahaman baru bagi pembuat kebijakan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan mempertahankan pengakuan publik melalui interaksi berkelanjutan. Dengan memahami legitimasi sebagai hasil negosiasi komunikatif, penelitian ini memberikan dasar konseptual untuk membaca konflik kebijakan bukan sebagai kegagalan komunikasi semata, melainkan sebagai bagian inheren dari proses produksi otoritas dalam demokrasi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi digital discourse analysis untuk memahami bagaimana legitimasi kebijakan dinegosiasikan melalui interaksi antara negara dan publik di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan mengukur sentimen atau opini publik secara kuantitatif, melainkan menafsirkan proses interaksi, pertukaran makna, serta dinamika klaim otoritas yang muncul dalam percakapan daring. Dengan demikian, data dipahami sebagai praktik komunikasi yang membentuk realitas sosial, bukan sekadar representasi sikap.

Desain penelitian berbentuk studi kasus intrinsik. Kasus dipilih berdasarkan kriteria:

- 1) Kebijakan pemerintah yang memicu perdebatan publik luas di media sosial,
- 2) Terdapat interaksi langsung antara akun pemerintah dan masyarakat,
- 3) Terjadi respons atau penyesuaian komunikasi dari pemerintah setelah reaksi publik.

Studi kasus memungkinkan analisis dinamika proses terhadap pembentukan legitimasi karena negosiasi kebijakan merupakan fenomena kontekstual dan tidak dapat dipisahkan dari situasi komunikasinya. Data penelitian berupa jejak komunikasi digital (digital trace data) yang terdiri dari:

- 1) Unggahan resmi akun pemerintah (pusat atau daerah) terkait kebijakan
- 2) Balasan masyarakat terhadap unggahan tersebut
- 3) Klarifikasi, respons, atau penyesuaian narasi dari pemerintah
- 4) Interaksi aktor perantara (influencer, komunitas, media)
- 5) Dokumen pendukung (siaran pers, infografik, konferensi pers daring)

Platform yang dianalisis difokuskan pada media sosial yang memiliki interaksi dua arah (misalnya X/Twitter, Instagram, atau YouTube komentar), karena karakter negosiasinya terlihat melalui dialog terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data berkaitan dengan pengumuman awal kebijakan MBG yang di sosialisasikan diberbagai media. Penyampaian kebijakan Program Makan Bergizi Gratis tidak berlangsung dalam satu fase komunikasi tunggal, melainkan melalui tahapan bertingkat yang melibatkan berbagai platform, mulai dari kampanye politik, institusionalisasi kebijakan, publikasi media massa, hingga diskursus digital di media sosial. Kronologi ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak terbentuk pada tahap perumusan atau peluncuran semata, tetapi berkembang melalui interaksi

berkelanjutan antara negara dan publik, khususnya dalam ruang komunikasi digital. Berikut data-data yang dikumpulkan dalam tabel dari proses awal hingga menghasilkan legitimasi terhadap kebijakan tersebut.

Tabel 1: Ringkasan Episode Interaksi Kebijakan MBG di Media Sosial

Episode	Kebijakan	Platform	Aktor Pemerintahan	Periode Interaksi	Intensitas Diskursus	Catatan Umum
E1	Program makan	X/Twitter	Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas	Minggu awal pengumuman program	Tinggi	Perdebatan mengenai besaran anggaran negara
E2	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Instagram	Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah	Masa sosialisasi program	Sedang	Diskusi tentang mekanisme distribusi makanan
E3	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	X/Twitter	Presiden dan Kementerian terkait	Setelah klarifikasi pemerintah	Sedang	Pemerintah merilis penjelasan Tambahan mengenai manfaat program

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber, 2026

Tabel tersebut menggambarkan bahwa dinamika kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tidak berlangsung dalam satu fase komunikasi yang statis, melainkan berkembang melalui beberapa episode interaksi yang menunjukkan perubahan intensitas, aktor, serta fokus diskursus publik di media sosial.

Pada episode pertama (E1), yang berlangsung pada minggu awal pengumuman kebijakan, terlihat bahwa intensitas diskursus berada pada tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa momen pengumuman kebijakan menjadi titik krusial yang memicu perhatian publik secara luas. Platform X/Twitter berperan sebagai ruang utama artikulasi kritik dan opini, dengan karakteristiknya yang cepat, terbuka, dan reaktif. Aktor pemerintah yang terlibat—seperti Presiden, Kementerian Keuangan, dan Bappenas—menunjukkan bahwa isu yang diperdebatkan berada pada level strategis, khususnya terkait aspek fiskal dan perencanaan pembangunan. Fokus utama perdebatan pada fase ini adalah besaran anggaran negara, yang mencerminkan bahwa legitimasi kebijakan langsung diuji melalui rasionalitas ekonomi dan

prioritas kebijakan. Dengan demikian, E1 merepresentasikan fase awal delegitimasi atau legitimacy challenge, dimana publik mulai mempertanyakan dasar kebijakan yang diajukan pemerintah.

Memasuki episode kedua (E2), intensitas diskursus mulai menurun ke tingkat sedang, yang mengindikasikan adanya pergeseran dari reaksi spontan menuju diskusi yang lebih terarah. Platform yang dominan juga bergeser ke Instagram, yang cenderung digunakan untuk komunikasi visual dan sosialisasi kebijakan. Aktor pemerintah yang terlibat pada fase ini lebih beragam, termasuk Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa kebijakan mulai masuk ke tahap implementasi dan operasionalisasi. Fokus diskursus publikpun berubah dari isu makro seperti anggaran ke isu mikro seperti mekanisme distribusi makanan. Hal ini menandakan bahwa publik tidak lagi hanya mempertanyakan legitimasi kebijakan secara konseptual, tetapi mulai menegosiasikan aspek teknis dan praktis dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain, E2 mencerminkan fase negotiation stage, dimana terjadi proses tawar-menawar antara ekspektasi publik dan penjelasan pemerintah.

Pada episode ketiga (E3), yang terjadi setelah pemerintah melakukan klarifikasi, intensitas diskursus tetap berada pada tingkat sedang, namun dengan karakter yang berbeda. Pemerintah kembali mengambil peran lebih dominan, khususnya melalui Presiden dan kementerian terkait, dengan merilis penjelasan tambahan mengenai manfaat program. Fokus komunikasi bergeser pada upaya memperkuat legitimasi melalui penekanan pada manfaat kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha melakukan konsolidasi narasi untuk merespons kritik sebelumnya. Diskursus publik pada fase ini cenderung lebih stabil dibandingkan fase awal yang mengindikasikan adanya perubahan dalam penerimaan publik, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kritik. Oleh karena itu, E3 dapat dipahami sebagai fase legitimacy consolidation dimana legitimasi kebijakan mulai terbentuk melalui proses klarifikasi dan penyesuaian komunikasi.

Secara keseluruhan, ketiga episode tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan MBG tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan perubahan fokus diskursus, aktor yang terlibat, serta strategi komunikasi pemerintah. Pergeseran dari kontroversi anggaran menuju diskusi teknis dan kemudian ke penegasan manfaat kebijakan menunjukkan adanya dinamika negosiasi legitimasi yang bersifat berulang. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menggambarkan kronologi interaksi, tetapi juga merepresentasikan proses transformasi dari konflik menuju pembentukan legitimasi dalam ruang digital.

Tabel 2: Klaim Legitimasi Pemerintah dalam Komunikasi Kebijakan MBG

Episode	Kutipan Pernyataan Pemerintah	Jenis Klaim Legitimasi	Kode	Interpretasi
E1	“Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.”	Moral	MOR	Pemerintah membingkai program sebagai kepentingan nasional
E1	“Program MBG akan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan mendukung pembangunan generasi emas.”	Kinerja	PER	Legitimasi berbasis manfaat kebijakan
E2	“Program ini dirancang berdasarkan kajian gizi dan pengalaman berbagai negara.”	Teknis	TEC	Legitimasi berbasis keahlian dan data
E3	“Anggaran program akan dikelola secara transparan dan bertahap.”	Legal/administratif	LEG	Penekanan pada akuntabilitas kebijakan

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber, 2026

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mengandalkan satu sumber legitimasi tunggal dalam mengomunikasikan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan menggunakan kombinasi klaim legitimasi yang berubah secara strategis mengikuti dinamika interaksi dengan publik. Dengan kata lain, legitimasi tidak diproduksi secara statis, tetapi dikonstruksi secara bertahap melalui pemilihan narasi yang disesuaikan dengan konteks diskursus yang berkembang.

Pada episode pertama (E1), pemerintah menempatkan legitimasi kebijakan dalam kerangka moral dan kinerja. Pernyataan bahwa program merupakan “investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia” menunjukkan upaya pemerintah membingkai kebijakan sebagai bagian dari kepentingan nasional yang bersifat universal dan normatif. Klaim ini tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi kebijakan, tetapi juga sebagai strategi untuk meminimalkan resistensi dengan mengaitkan kebijakan pada nilai-nilai yang sulit ditolak, seperti masa depan generasi bangsa. Pada saat yang sama, pemerintah juga menggunakan klaim berbasis kinerja dengan menekankan manfaat konkret, seperti peningkatan kualitas gizi dan pembangunan “generasi

emas". Kombinasi antara klaim moral dan kemanfaatannya ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, pemerintah berupaya membangun legitimasi melalui pendekatan normatif sekaligus rasional. Namun, dominasi dua jenis klaim ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah masih berada pada tahap afirmasi kebijakan dimana komunikasi cenderung bersifat satu arah dan belum sepenuhnya merespons kritik publik.

Memasuki episode kedua (E2), terjadi pergeseran signifikan dalam strategi legitimasi. Pemerintah mulai mengandalkan klaim teknokratik dengan menekankan bahwa kebijakan dirancang berdasarkan kajian gizi dan pengalaman berbagai negara. Pergeseran ini mencerminkan respons terhadap meningkatnya tuntutan publik akan rasionalitas dan kredibilitas kebijakan. Jika pada tahap awal legitimasi dibangun melalui nilai dan manfaat, maka pada tahap ini legitimasi diperkuat melalui otoritas pengetahuan dan keahlian. Klaim teknis ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berusaha meyakinkan publik secara normatif, tetapi juga berupaya menjawab kritik dengan pendekatan berbasis evidensi. Dengan demikian, E2 dapat dipahami sebagai fase di mana legitimasi mulai dinegosiasikan secara lebih rasional, seiring dengan meningkatnya kompleksitas pertanyaan publik terhadap aspek implementasi kebijakan.

Pada episode ketiga (E3), strategi legitimasi kembali mengalami penyesuaian dengan munculnya klaim legal-administratif. Pernyataan mengenai pengelolaan anggaran yang transparan dan bertahap menunjukkan bahwa pemerintah mulai merespons kekhawatiran publik terkait akuntabilitas dan tata kelola kebijakan. Klaim ini menandai pergeseran fokus dari pembenaran kebijakan ke upaya mempertahankan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, legitimasi tidak lagi hanya dibangun melalui tujuan dan manfaat kebijakan, tetapi juga melalui jaminan prosedural mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kritik publik semakin mengarah pada aspek implementasi dan potensi penyimpangan, pemerintah merespons dengan memperkuat dimensi institusional legitimasi.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan MBG dibangun melalui strategi yang bersifat adaptif dan berlapis. Pemerintah tidak hanya menggunakan satu jenis klaim, tetapi mengombinasikan klaim moral, kinerja, teknis, dan legal sesuai dengan dinamika interaksi dengan publik. Pergeseran dari legitimasi normatif menuju legitimasi teknokratik dan kemudian ke legitimasi administratif mencerminkan proses negosiasi yang berlangsung dalam ruang komunikasi digital. Dengan demikian, legitimasi tidak muncul sebagai kondisi awal yang melekat pada kebijakan, tetapi sebagai hasil dari penyesuaian berkelanjutan dalam strategi komunikasi pemerintah.

Tabel 3: Bentuk Tantangan Publik terhadap Kebijakan MBG

Episode	Kutipan Respons Publik	Jenis Tantangan	Kode	Makna Delegitimasi
E1	“Anggaran program ini terlalu besar, apakah tidak lebih baik dialokasikan untuk sektor lain?”	Kritik rasional	CRI	Kontestasi terhadap prioritas kebijakan
E1	“Di daerah kami masih banyak sekolah kekurangan fasilitas.”	Pengalaman warga	EXP	Kritik berbasis pengalaman lokal
E2	“Program ini baik, tetapi bagaimana distribusi makanan ke daerah terpencil?”	Tuntutan perubahan	DEM	Negosiasi teknis implementasi
E2	Meme yang menyindir kebijakan MBG	Humor/sarkasme	HUM	Delegitimasi simbolik melalui satire

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa publik tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, melainkan aktor aktif yang melakukan berbagai bentuk delegitimasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui ekspresi yang beragam di media. Respons publik yang muncul tidak bersifat homogen, tetapi mencerminkan spektrum kritik yang berbeda—mulai dari rasional, berbasis pengalaman, hingga simbolik—yang secara keseluruhan membentuk tekanan terhadap klaim legitimasi pemerintah.

Pada episode pertama (E1), bentuk tantangan publik didominasi oleh kritik rasional dan pengalaman langsung. Kritik mengenai besaran anggaran menunjukkan bahwa publik menempatkan kebijakan dalam kerangka evaluasi ekonomi dan prioritas nasional. Pernyataan seperti “apakah tidak lebih baik dialokasikan untuk sektor lain?” mencerminkan adanya kontestasi terhadap alokasi sumber daya negara dimana legitimasi kebijakan diuji berdasarkan efisiensi dan urgensi. Dalam konteks ini, publik tidak menolak tujuan kebijakan secara normatif, tetapi mempertanyakan rasionalitasnya dalam struktur prioritas pembangunan. Kritik ini memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari persepsi publik mengenai keadilan distribusi anggaran.

Selain itu, munculnya respons berbasis pengalaman warga memperlihatkan dimensi lain dari delegitimasi. Pernyataan mengenai masih banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas menunjukkan bahwa publik menggunakan pengalaman empiris sebagai dasar untuk menilai relevansi kebijakan. Kritik jenis ini memiliki kekuatan yang berbeda dibandingkan kritik rasional, karena tidak

hanya berbasis argumen, tetapi juga realitas sosial yang dirasakan secara langsung. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak hanya diuji melalui logika kebijakan, tetapi juga melalui kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara narasi nasional yang dibangun pemerintah dan pengalaman lokal yang dihadapi masyarakat.

Memasuki episode kedua (E2), bentuk tantangan publik mengalami pergeseran dari delegitimasi menuju negosiasi. Pernyataan seperti “program ini baik, tetapi bagaimana distribusi makanan ke daerah terpencil?” menunjukkan bahwa publik mulai mengakui nilai kebijakan, namun tetap mempertanyakan aspek implementasinya. Kritik ini tidak lagi bersifat menolak, tetapi lebih pada tuntutan perbaikan. Dengan kata lain, publik mulai beralih dari posisi oposisi menuju posisi negosiatif. Hal ini menandakan bahwa legitimasi kebijakan mulai terbentuk, tetapi masih bersifat kondisional. Penerimaan terhadap kebijakan bergantung pada kemampuan pemerintah menjawab pertanyaan teknis yang diajukan publik.

Di sisi lain, munculnya ekspresi humor dan satire dalam bentuk meme menunjukkan dimensi delegitimasi simbolik yang khas dalam ruang digital. Kritik melalui humor tidak selalu disampaikan secara langsung, tetapi memiliki dampak signifikan dalam membentuk persepsi publik. Meme yang menyindir kebijakan MBG menunjukkan bahwa legitimasi dapat dilemahkan melalui praktik budaya populer yang bersifat informal. Bentuk delegitimasi ini sering kali lebih mudah menyebar dan memiliki daya resonansi yang tinggi di media sosial, sehingga berpotensi memperkuat atau memperluas kritik publik. Dengan demikian, delegitimasi tidak hanya terjadi melalui diskursus rasional, tetapi juga melalui produksi makna simbolik yang memengaruhi opini kolektif.



Gambar 1: Meme Menyindir Program MBG

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa publik memainkan peran penting dalam proses negosiasi legitimasi kebijakan. Berbagai bentuk tantangan yang muncul—rasional, pengalaman, negosiatif, dan simbolik—menunjukkan bahwa legitimasi tidak dapat dipaksakan dari atas, tetapi harus diperoleh melalui interaksi yang mempertimbangkan perspektif publik. Pergeseran dari kritik tajam pada tahap awal menuju tuntutan perbaikan pada tahap berikutnya juga mengindikasikan bahwa delegitimasi dapat berkembang menjadi proses negosiasi dimana publik tidak hanya menolak, tetapi juga berupaya memengaruhi arah kebijakan. Dengan demikian, respons publik dalam tabel ini merepresentasikan dinamika penting dalam pembentukan legitimasi kebijakan di era digital.

Tabel 4: Respons Pemerintah terhadap Kritik Publik

Episode	Respons Pemerintah	Jenis Respons	Kode	Fungsi Negosiasi
E1	Pemerintah merilis infografik tentang manfaat program MBG	Klarifikasi	CLAR	Menjaga legitimasi melalui informasi
E2	Penjelasan teknis tentang distribusi makanan oleh kementerian	Edukasi	EDUC	Persuasi rasional
E3	Pernyataan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran publik	Empati	EMP	Rekonsiliasi simbolik
E3	Penyesuaian narasi bahwa program akan dilakukan secara bertahap	Reframing	REF	Kompromi diskursif

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber, 2026

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa respons pemerintah terhadap kritik publik dalam kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat reaktif semata, melainkan menunjukkan pola komunikasi yang strategis dan bertahap sebagai bagian dari proses negosiasi legitimasi. Respons yang muncul tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memulihkan legitimasi kebijakan di tengah tekanan diskursus publik.

Pada episode pertama (E1), respons pemerintah berupa penyebaran infografik mengenai manfaat program menunjukkan pendekatan klarifikasi yang berbasis informasi. Strategi ini mengindikasikan bahwa pemerintah memandang kritik awal publik sebagai akibat dari kurangnya pemahaman atau potensi misinformasi. Dengan demikian, klarifikasi dilakukan untuk meluruskan narasi dan memperkuat posisi kebijakan melalui penyajian data yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam konteks ini, fungsi utama

komunikasi adalah menjaga legitimasi melalui transparansi informasi. Namun, pendekatan ini juga mencerminkan bahwa pada tahap awal pemerintah masih menggunakan logika komunikasi satu arah, di mana informasi dianggap cukup untuk meredam kritik publik.

Memasuki episode kedua (E2), respons pemerintah berkembang menjadi lebih substantif melalui pemberian penjelasan teknis terkait distribusi makanan. Pergeseran dari klarifikasi umum menuju edukasi teknis menunjukkan bahwa pemerintah mulai merespon kritik publik secara lebih spesifik. Strategi edukasi ini berfungsi sebagai bentuk persuasi rasional dimana legitimasi kebijakan dibangun melalui argumentasi yang lebih detail dan berbasis pengetahuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah menyadari bahwa kritik publik tidak lagi dapat diatasi hanya dengan informasi umum, tetapi memerlukan penjelasan yang lebih mendalam terkait aspek implementasi. Dengan demikian, komunikasi kebijakan pada tahap ini mulai bergerak ke arah interaksi yang lebih dialogis, meskipun masih dalam kerangka penguatan posisi pemerintah.

Pada episode ketiga (E3), respons pemerintah menunjukkan dimensi yang lebih relasional melalui pernyataan empati terhadap kekhawatiran publik. Pengakuan terhadap kekhawatiran masyarakat menandai perubahan penting dalam strategi komunikasi, dari yang sebelumnya bersifat teknokratik menjadi lebih humanis. Respons empatik ini tidak hanya berfungsi untuk meredakan ketegangan, tetapi juga untuk membangun kembali hubungan simbolik antara pemerintah dan publik. Dalam konteks negosiasi legitimasi, empati menjadi alat penting untuk menciptakan rasa pengakuan (*recognition*) bahwa suara publik didengar dan dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah berinteraksi secara emosional dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan reframing dengan menyesuaikan narasi kebijakan, khususnya dengan menekankan bahwa program akan dilaksanakan secara bertahap. Reframing ini merupakan bentuk kompromi diskursif yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kritik publik tanpa harus mengubah tujuan utama kebijakan. Dengan mengubah cara kebijakan dipresentasikan, pemerintah berupaya mengurangi resistensi sekaligus mempertahankan arah kebijakan. Strategi ini menunjukkan bahwa negosiasi legitimasi tidak selalu berujung pada perubahan substansi kebijakan, tetapi dapat terjadi melalui perubahan narasi yang membuat kebijakan lebih dapat diterima oleh publik.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa respons pemerintah dalam menghadapi kritik publik berkembang dari pendekatan informatif menuju pendekatan yang lebih adaptif dan relasional. Klarifikasi, edukasi, empati, dan reframing merupakan tahapan yang mencerminkan bagaimana

pemerintah menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan dinamika interaksi publik. Pergeseran ini menegaskan bahwa legitimasi kebijakan tidak dapat dipertahankan melalui komunikasi satu arah, melainkan membutuhkan kemampuan untuk merespons, menyesuaikan, dan bernegosiasi dengan publik. Dengan demikian, respons pemerintah dalam tabel ini merepresentasikan proses negosiasi legitimasi yang bersifat dinamis dimana komunikasi menjadi instrumen utama dalam mempertahankan otoritas kebijakan di ruang digital.

Tabel 5: Respons Lanjutan Publik

Episode	Reaksi Publik	Kode	Makna
E1	Sebagian publik masih mempertanyakan anggaran	SPL	Legitimasi parsial
E2	Publik mulai menerima dengan syarat transparansi	CON	Penerimaan bersyarat
E3	Dukungan meningkat terhadap tujuan program	ACC	Legitimasi mulai terbentuk

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber, 2026

Tabel 6: Outcome Negosiasi Legitimasi

Epi sod e	Pola Negosiasi	Outcome Legitimasi	Interpretasi
E1	MOR/PER → CRI → CLAR → SPL	Fragile Legitimacy	Legitimasi awal masih diperdebatkan
E2	TEC → DEM → EDUC → CON	Negotiated Legitimacy	Legitimasi melalui penjelasan teknis
E3	LEG → HUM → EMP/REF → ACC	Stabilized Legitimacy	Legitimasi diperkuat melalui empati dan klarifikasi

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber, 2026

Kedua tabel tersebut memperlihatkan bagaimana respons publik dan outcome legitimasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkembang secara bertahap melalui proses negosiasi antara negara dan masyarakat. Pada episode pertama (E1), reaksi publik yang masih mempertanyakan anggaran menunjukkan kondisi legitimasi parsial (SPL), dimana kebijakan belum sepenuhnya diterima. Hal ini tercermin dalam pola negosiasi MOR/PER → CRI → CLAR → SPL, yang menghasilkan fragile legitimacy. Artinya, klaim legitimasi moral dan kinerja dari pemerintah belum mampu mengatasi kritik rasional publik, sehingga legitimasi masih diperdebatkan. Dalam perspektif teori legitimasi, kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas dan tujuan normatif belum cukup untuk menghasilkan pengakuan publik tanpa adanya penerimaan sosial.

Memasuki episode kedua (E2), terjadi perubahan signifikan dalam respons publik. Munculnya penerimaan bersyarat (CON) menandakan bahwa publik mulai mengakui kebijakan, tetapi dengan tuntutan tertentu, terutama terkait transparansi dan implementasi teknis. Pola negosiasi TEC → DEM → EDUC → CON menunjukkan bahwa legitimasi dibangun melalui interaksi berbasis pengetahuan, di mana pemerintah merespons tuntutan publik dengan penjelasan teknis. Dalam konteks ini, legitimasi tidak diberikan secara otomatis, melainkan dinegosiasikan melalui pertukaran argumen rasional. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan yang menekankan bahwa penerimaan kebijakan bergantung pada responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan ekspektasi publik.

Pada episode ketiga (E3), dukungan publik mulai meningkat (ACC), yang menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan mulai terbentuk. Pola negosiasi LEG → HUM → EMP/REF → ACC menghasilkan *stabilized legitimacy* dimana legitimasi diperkuat melalui kombinasi pendekatan administratif, empati, dan penyesuaian narasi. Dalam tahap ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan argumentasi teknis, tetapi juga membangun hubungan simbolik dengan publik melalui empati. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga emosional dan relasional.

Jika keenam tabel dianalisis secara keseluruhan, terlihat bahwa proses pembentukan legitimasi kebijakan mengikuti logika bertahap yang dapat dijelaskan melalui integrasi teori kebijakan, teori negosiasi, dan teori legitimasi. Dari perspektif teori kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh interaksi dengan publik yang dapat mengubah arah komunikasi dan bahkan substansi kebijakan. Kebijakan MBG tidak hanya dijalankan, tetapi juga “dikelola” melalui komunikasi untuk memperoleh penerimaan publik.

Dari perspektif teori negosiasi, interaksi antara pemerintah dan publik dapat dipahami sebagai proses tawar-menawar makna. Pemerintah mengajukan klaim legitimasi, publik merespons dengan kritik, dan kemudian terjadi penyesuaian melalui klarifikasi, edukasi, empati, dan reframing. Proses ini menunjukkan bahwa legitimasi merupakan hasil dari bargaining process, bukan hasil dari keputusan sepihak. Negosiasi tidak selalu menghasilkan konsensus penuh, tetapi menghasilkan kompromi yang memungkinkan kebijakan tetap berjalan.

Sementara itu, dari perspektif teori legitimasi, temuan ini menegaskan bahwa legitimasi bersifat relasional dan berkelanjutan. Legitimasi tidak muncul secara instan, tetapi berkembang dari kondisi rapuh menuju stabil melalui interaksi yang berulang. Penerimaan publik yang bersifat kondisional menunjukkan bahwa legitimasi selalu terbuka terhadap perubahan dan

bergantung pada kemampuan pemerintah mempertahankan kepercayaan melalui komunikasi yang responsif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan MBG bukanlah hasil dari desain kebijakan semata, melainkan hasil dari proses negosiasi komunikatif antara negara dan publik di media sosial. Integrasi ketiga perspektif teori tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan publik di era digital sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola interaksi, merespons kritik, dan membangun pengakuan publik secara berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini cukup signifikan. Pertama, secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan konsep legitimasi, komunikasi, dan negosiasi dalam satu kerangka analitis. Hal ini memperkaya literatur yang selama ini cenderung terfragmentasi. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis wacana digital dapat digunakan untuk memahami proses legitimasi secara lebih mendalam. Ketiga, secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan bahwa komunikasi bukan sekadar alat untuk menyampaikan kebijakan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembentukan legitimasi.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa negosiasi legitimasi memiliki batas. Tidak semua tuntutan publik dapat diakomodasi, dan tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi. Dalam beberapa kasus, terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk mempertahankan otoritas dan kebutuhan untuk merespons publik. Ketegangan ini menunjukkan bahwa legitimasi selalu berada dalam kondisi yang tidak stabil. Oleh karena itu, tantangan utama bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara otoritas dan responsivitas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa legitimasi kebijakan dalam era digital tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan dinamika interaksi antara negara dan publik. Media sosial telah mengubah cara legitimasi dibangun, dipertahankan, dan ditantang. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan menjadi arena negosiasi yang menentukan apakah suatu kebijakan memperoleh pengakuan atau justru mengalami delegitimasi. Dengan demikian, memahami legitimasi sebagai proses negosiasi bukan hanya penting secara akademik, tetapi juga krusial bagi praktik pemerintahan yang efektif di era digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa legitimasi kebijakan tidak lagi bersumber dari legalitas formal atau desain kebijakan semata,

melainkan dari kemampuan negara menegosiasikan pengakuan publik dalam ruang komunikasi digital. Kasus Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa legitimasi terbentuk melalui proses bertahap—dari kondisi rapuh, dinegosiasikan, hingga relatif stabil—yang ditentukan oleh interaksi antara klaim pemerintah dan respons publik.

Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan bukan lagi sekadar penyampaian informasi, tetapi arena tawar-menawar makna dan otoritas. Publik tidak hanya menerima atau menolak, tetapi secara aktif memaksa negara menyesuaikan narasi, strategi, bahkan pendekatan kebijakan. Akibatnya, kepatuhan publik bersifat kondisional, bergantung pada sejauh mana pemerintah responsif terhadap kritik dan tuntutan.

Secara kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan memahami dinamika negosiasi ini akan membuat kebijakan—sekuat apa pun secara normatif—rentan kehilangan legitimasi. Sebaliknya, keberhasilan kebijakan di era digital tidak ditentukan oleh seberapa baik kebijakan dirancang, tetapi oleh seberapa efektif negara mengelola interaksi dan mempertahankan pengakuan publik secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Akker, A., Gilmore, A., Fabbri, A., Knai, C., & Rutter, H. (2024). Aligning rhetoric with reality: A qualitative analysis of multistakeholder initiatives in the global food system. *Health Promotion International*, 39(6).
- BBC News Indonesia. (2020). Penolakan UU Cipta Kerja dan gelombang protes nasional.
- Brenton, S., & Stein, J. (2024). The legitimacy of local government in the Australian federation. *Politics & Policy*, 52(2), 450–470.
- Canfield, M., Duncan, J., & Claeys, P. (2021). Reconfiguring food systems governance: The UNFSS and the battle over authority and legitimacy. *Development*, 64(3–4), 181–191.
- Chan, N., Su, C., & Ingber, A. (2023). Shifting platform values in community guidelines: Examining the evolution of TikTok's governance frameworks. *New Media & Society*, 27(2), 1127–1151.
- CNN Indonesia. (2022). Respons pemerintah terhadap kenaikan harga BBM dan komunikasi publik.
- Couraceiro, P., Paisana, M., Vasconcelos, A., Cardoso, G., & Lopes, F. (2025). Building legitimacy: Audience trust as a pillar of public service media. *Journal of Digital Media & Policy*.

- Detik.com. (2021). Penyesuaian kebijakan PPKM dan respons pemerintah terhadap masyarakat.
- Diamond, A. (2023). The narrative construction of state (il)legitimacy in Colombia. *Sociological Forum*, (4), 1311–1333.
- Dodge, J., & Metze, T. (2024). Approaches to policy framing: Deepening a conversation across perspectives. *Policy Sciences*, 57(2), 221–256.
- Grelle, S., & Hofmann, W. (2023). When and why do people accept public-policy interventions? An integrative public-policy-acceptance framework. *Perspectives on Psychological Science*, 19(1), 258–279.
- Järvelä, J. (2024). Governance transference and shifting capacities and expectations in multi-stakeholder initiatives. *Regulation & Governance*, 19(1), 87–103.
- Joanly, R., Wijaya, S., & Jaolis, F. (2022). Religious influencers on social media: Do they affect followers' religiosity and intention to donate?
- Kompas.com. (2020). Respons pemerintah terhadap kritik publik UU Cipta Kerja di media sosial
- Kompas.com. (2021). Perubahan kebijakan PPKM dan komunikasi risiko pemerintah.
- Lyu, T. (2025). Citizen's policy compliance with stringent measures in public health crisis. *SAGE Open*, 15(4).
- Muhammad, I. (2025). Negotiating power in public policy discourse on social media: A critical discourse analysis. *Journal of Language Development and Linguistics*, 4(2), 111–124.
- Pettersson, H., Holmes, G., Quinn, C., Sait, S., & Blanco, J. (2023). Contested discourses on human-wolf coexistence. *People and Nature*, 5(6), 1989–2005.
- Putri, N. (2025). Political communication in building leadership image on Instagram. *E-Journal of Cultural Studies*, (4), 17–34.
- Rendtorff, J. (2020). Philosophical theory of business legitimacy: The political corporation.
- Riduan, A. (2024). Citizen participation in policy decision-making. *MULTI*, 1(2), 65–74.
- Salah, M., Halbusi, H., Najem, A., Razali, A., Williams, K., & Mustamil, N. (2021). Impact of risk perception on trust in government during COVID-19.
- Sandhu, S., Wilson, E., & Chattopadhyay, K. (2023). Social media as a tool for government messaging. *International Journal of Environmental Research*

- and Public Health, 20(20), 6903.
- Schmitt-Beck, R. (2022). Prerequisites of deliberative democracy. *Studies in Communication and Media*, 11(1), 7–72.
- Schwaderer, C. (2025). Government messaging and online sense-making during crises. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*.
- Tempo.co. (2022). Strategi komunikasi pemerintah terkait kebijakan BBM.
- Walsh, L., Hyett, N., Howley, J., et al. (2021). The risks and benefits of using social media in public services. *BMC Health Services Research*, 21(1).
- Wiranti, D., & Ariawantara, P. (2024). Government responsiveness and public acceptance of COVID-19 policies. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(1), 85–100.